

Proliferasi Nuklir dan Permasalahannya

A.R. SUTOPO

Strategi nuklir negara-negara adikuasa dewasa ini cukup rumit dan mengandung kecemasan-kecemasan mengenai tidak pastinya jaminan keamanan dan perdamaian internasional di masa depan. Terutama dalam konteks keamanan dan perdamaian internasional ini, masyarakat manusia dibayangi ketakutan bila perang nuklir pecah, efek-efeknya yang dahsyat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat mengerikan. Akan tetapi ketakutan itu tidak secara otomatis mendorong secara sungguh-sungguh pemusnahan jenis-jenis persenjataan nuklir dari jajaran kekuatan negara-negara di dunia. Sebaliknya, malahan terdapat pertanda bahwa sejak pertama kali jenis persenjataan ini dikenal, selama empat dasawarsa terakhir ini jumlah negara yang menguasainya makin bertambah walaupun perkembangannya relatif sangat lambat.

Adanya ketakutan akan pecahnya suatu perang nuklir di masa depan telah mendorong masyarakat internasional untuk mencegah agar persenjataan nuklir tidak dikuasai dan dibuat oleh lebih banyak negara lagi. Harapannya adalah bahwa dengan tidak bertambahnya jumlah negara yang memiliki sistem persenjataan itu akan dapat mengurangi, atau sekurang-kurangnya tidak memperbesar, kemungkinan terjadinya perang nuklir baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Akan tetapi tampaknya ciri hubungan internasional yang sering dianggap sebagai masyarakat anarkis tidak terlalu tanggap terhadap maksud-maksud baik yang dikandung dalam keinginan-keinginan seperti itu, yang berpuncak pada persetujuan non-proliferasi (Non-Proliferation Treaty, NPT) tahun 1968 dan dalam usaha-usaha untuk membentuk zona-zona bebas (senjata) nuklir di berbagai kawasan dunia.

Telaah ini berusaha memahami beberapa persoalan yang berkaitan erat dengan masalah-masalah penyebaran nuklir karena adanya anggapan bahwa

hingga kini masih tidak tertutup kemungkinan sejumlah negara yang secara potensial menunjukkan kemampuannya dalam teknologi persenjataan nuklir akan terangsang untuk memiliki atau membuat jenis persenjataan tersebut. Pembahasannya akan dititikberatkan pada masalah-masalah pokok seperti apa arti dari penyebaran nuklir (yang diambil dari istilah "nuclear proliferation"); mengapa suatu negara memilih persenjataan nuklir sebagai salah satu komponen kekuatan militer dan pertahanannya; dan apa pengaruhnya terhadap keamanan internasional secara global maupun regional. Ini semua adalah beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas masalah proliferasi.

PENGERTIAN PROLIFERASI NUKLIR DAN KOMPLIKASI-KOMPLIKASINYA

Persoalan "proliferasi" nuklir sudah lama menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan dalam kerangka politik luar negeri, baik dari negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir, negara-negara yang menginginkan tidak ditutupnya kemungkinan untuk memiliki jenis persenjataan itu, maupun negara-negara yang menolak untuk memilikinya dan bahkan eksistensinya. Perbedaan timbul karena di satu pihak senjata nuklir dilihat sebagai salah satu alat bagi suatu negara untuk mencapai dan mempertahankan tujuan-tujuan politik, militer, dan ekonomi dalam menghadapi lingkungan internasional yang penuh dengan dilema. Di lain pihak, penguasaan lebih banyak lagi persenjataan nuklir, baik oleh negara-negara yang sudah memilikinya maupun oleh negara-negara yang menyusul berikutnya, dianggap cenderung memperbesar kemungkinan timbulnya konflik nuklir dengan kemungkinan kehancuran yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami dalam sejarah dan "nuclear winter" dalam jangka panjang.

Sebenarnya dalam "proliferasi" nuklir terkandung dua pengertian dasar, yaitu *proliferasi vertikal* dan *proliferasi horisontal*. Proliferasi vertikal diartikan sebagai terjadinya peningkatan jumlah dan kualitas persenjataan nuklir yang dimiliki oleh negara-negara yang telah menguasai jenis persenjataan ini. Proliferasi vertikal ini bisa terjadi misalnya pada jumlah wahana peluncur (ICBM, SLBM, pembom nuklir) dan jumlah hululedak (warheads) baik secara keseluruhan maupun yang dipasang dalam satu wahana peluncur seperti dalam sistem MIRV. Biasanya proliferasi vertikal dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara besar, khususnya negara-negara adikuasa, dalam meningkatkan ketangguhan sistem-sistem persenjataan nuklir mereka. Sedangkan proliferasi horisontal diartikan sebagai meluasnya kemampuan membuat atau penguasaan persenjataan nuklir oleh *lebih banyak negara* lagi dari jumlah yang telah ada. Telaah ini akan lebih banyak memusatkan perhatiannya pada proliferasi horisontal.

Sebelum beranjak lebih jauh, di sini perlu disadari lebih dahulu adanya kesulitan untuk menempatkan pada proporsinya senjata-senjata nuklir yang berada di luar wilayah negara pembuatnya. Untuk mendukung strateginya, misalnya, Amerika Serikat menempatkan sejumlah persenjataan nuklir, baik yang dikualifikasikan sebagai rudal-rudal jarak menengah maupun senjata-senjata taktisnya, di berbagai negara sekutunya, terutama di negara-negara anggota NATO, dan wilayah-wilayah lautan di luar kedaulatan nasionalnya. Uni Soviet, hingga taraf tertentu, juga melakukan tindakan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu. Berkenaan dengan itu, masalah kontrol penggunaan persenjataan nuklir, khususnya yang ditempatkan di negara-negara sekutunya, apakah sepenuhnya berada pada pihak yang menempatkan atau pada pihak yang ditempati, merupakan bidang yang dapat diperdebatkan pengaruhnya terhadap proliferasi nuklir. Karena itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di atas tidak akan dibahas secara mendalam dalam telaah ini. Cukup dinyatakan di sini bahwa hal-hal itu dapat dikaitkan dengan proliferasi vertikal dan horisontal, tergantung sebagian pada siapa yang menentukan keputusan dalam mempergunakan atau tidak mempergunakan persenjataan itu.

Dewasa ini jarang sekali ditemui adanya suatu negara yang secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang mengembangkan penelitian untuk membuat persenjataan-persenjataan nuklir sebagai bagian dari sistem persenjataannya. Kekhawatiran atau kecurigaan dari berbagai pihak mengenai kemungkinan sesuatu negara mengusahakan untuk memiliki persenjataan nuklir kini terutama dikaitkan dengan adanya riset-riset di bidang nuklir, yang disertai dengan reaktor-reaktor nuklir, dan pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan-tujuan damai, seperti pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan penelitian-penelitian geologi. Karena itu proliferasi horisontal pada umumnya diperkirakan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui cara langsung dan tidak langsung. Selain itu, mungkin juga sesuatu negara dapat memiliki persenjataan nuklir melalui cara dengan memperolehnya dari pihak lain, suatu cara yang tidak dibicarakan dalam telaah ini.

Yang dimaksudkan dengan cara langsung ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh sesuatu negara melalui penelitian-penelitian dan pengembangannya sendiri atau dengan bantuan pihak luar untuk membuat persenjataan nuklir baik dari kilang-kilang pemurnian uranium maupun reaktor-reaktor nuklir yang dimilikinya. Melalui kilang-kilang pemurnian, yang dilakukan adalah memperkaya uranium (alam) untuk dapat menghasilkan U^{235} dengan tingkat kemurnian 90% atau lebih sebagai bahan baku senjata nuklir, sebab uranium alam hanya mengandung U^{235} kurang dari 1%. Melalui reaktor-reaktor, yang dilakukan adalah menghasilkan plutonium (Pu) yang mempunyai isotop memadai, yaitu Pu-239, sebagai bahan baku persenjataan nuklir. Proses melalui jalan langsung ini sangat rumit dan membutuhkan biaya yang sangat

tinggi, baik dalam pengertian keuangan maupun pengetahuan dan rekayasannya.

Melalui cara tidak langsung, yang dianggap jauh lebih "murah," suatu negara dapat membuat persenjataan nuklir dengan memanfaatkan hasil sampingan dari reaktor-reaktor nuklir yang dimilikinya yang fungsi utamanya adalah untuk tujuan-tujuan damai. Pengoperasian reaktor-reaktor nuklir, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik yang kini dimiliki oleh berbagai negara di dunia, dengan mempergunakan bahan bakar uranium akan menghasilkan plutonium sebagai hasil sampingan. Pada gilirannya plutonium ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar reaktor atau sebagai bahan baku senjata nuklir setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut. Pada prinsipnya, makin besar reaktor yang dimiliki, makin besar pula bahan bakar yang dibutuhkan untuk menggerakkannya, dan semakin besar pula plutonium yang dihasilkan. Berdasarkan pertimbangan demikian inilah kemungkinan terjadinya proliferasi horisontal terjadi berhubung makin banyak negara, terutama sejak dasawarsa 1970-an, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan energinya melalui tenaga nuklir.

Proliferasi horisontal kini makin menjadi perhatian setelah sejak semula usaha-usaha untuk mencegahnya tidak menunjukkan hasil yang memadai. Kegagalan Amerika Serikat untuk memonopoli teknologi nuklir, baik melalui McMahon Act (1946) maupun Baruch Plan (1946), mendorongnya untuk mengajukan usul agar suatu badan internasional dibentuk untuk mengelola pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir agar tidak disalahgunakan oleh negara-negara di dunia. Kemudian kegagalan "Rencana PBB" (1948) yang tidak jauh berbeda dari Baruch Plan terjadi pada tahun 1949 ketika Uni Soviet menunjukkan keberhasilannya dalam uji-coba ledakan nuklirnya. Dalam perkembangannya, proliferasi horisontal ini kemudian disusul oleh Inggris (1952), Prancis (1960) dan RRC (1964). Rencana-rencana seperti dikemukakan di atas pada pokoknya menunjukkan bahwa selain tenaga nuklir itu dapat dipergunakan sebagai alat penghancur yang dahsyat dalam hubungan antar negara, dan terutama pada masa itu aspek ini jauh lebih menonjol, tenaga nuklir juga dapat dieksploitasi untuk tujuan-tujuan damai. Dari sebab itu, setelah kegagalan diplomasinya untuk mencegah proliferasi horisontal, sejak tahun 1953 Pemerintah Amerika Serikat mengusahakan untuk "membelokkan" perhatian dunia dari pemanfaatan tenaga nuklir untuk kepentingan perang kepada pemanfaatan nuklir untuk tujuan-tujuan damai.

Di Amerika Serikat sendiri sejak semula sudah terdapat sekelompok orang yang berkepentingan untuk memanfaatkan tenaga nuklir bagi tujuan-tujuan damai secara komersial. Kalangan industri di Amerika Serikat melihat bahwa kemungkinan ini dapat memberikan keuntungan melalui ekspor reaktor-

reaktor nuklir di kemudian hari. Dalam pidatonya di muka Sidang Umum PBB akhir tahun 1953 Presiden Eisenhower mengajukan gagasan mengenai pemanfaatan nuklir dalam usulnya mengenai "Atoms for Peace." Menyadari bahwa rahasia nuklir tidak dapat dikuasai oleh satu negara saja dan karena adanya bahaya yang dahsyat dari persenjataan nuklir, Presiden Eisenhower mengajukan suatu program internasional untuk mengembangkan dan memanfaatkan nuklir bagi tujuan-tujuan damai. Berdasarkan usulan mengenai "Atoms for Peace" ini, yang menarik banyak negara di dunia, secara terorganisasi pengiriman bahan-bahan nuklir ke berbagai negara dimulai. Dengan sistem pengamanan yang disepakati kemudian, khususnya melalui mekanisme "safeguards" Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang dibentuk pada tahun 1957, diharapkan transfer material nuklir tersebut tidak akan disalahgunakan oleh negara penerima untuk maksud-maksud militer. Reaktor-reaktor nuklir untuk pembangkit listrik yang kemudian dijual ke berbagai negara, terutama ke negara-negara Dunia Ketiga, tidak lepas sama sekali kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat berdasarkan usulan tersebut.

Persoalan yang banyak menyita perhatian dalam proliferasi nuklir horisontal dewasa ini terutama dikaitkan dengan masalah reaktor nuklir yang ada di, maupun yang akan dibeli oleh, berbagai negara yang tidak memiliki persenjataan nuklir hingga dewasa ini. Persoalan yang sering dikemukakan dalam kaitan ini adalah kekhawatiran mengenai kemungkinan negara-negara yang telah memiliki reaktor-reaktor nuklir (untuk maksud-maksud damai) itu juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan persenjataan nuklir, dengan memanfaatkan plutonium yang dihasilkannya, misalnya, secara diam-diam. Kekhawatiran demikian ini berkaitan dengan adanya masalah teknis yang belum dapat diatasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan-tujuan damai itu, seperti misalnya untuk pembangkit tenaga listrik, tanpa juga menghasilkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir. Suatu negara yang memiliki reaktor nuklir, terutama reaktor yang besar, secara teoretis, cepat atau lambat, akan makin mempunyai kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Dalam kaitan ini, salah satu unsur penting adalah kemauan politik dari negara yang bersangkutan apakah menghendaki atau tidak untuk memiliki persenjataan nuklir dalam sistem persenjataannya.

RANGSANGAN DAN KENDALA MENGUASAI SENJATA-SENJATA NUKLIR

Kemauan politik suatu negara sangat menentukan usaha-usaha untuk menguasai atau tidak menguasai persenjataan nuklir, oleh karena dalam

tatanan internasional hingga kini tidak terdapat suatu lembaga atau kekuatan pusat yang disepakati mempunyai kemampuan untuk memaksakan "aturan-aturan permainan" kepada setiap negara yang menjadi pelaku dalam panggung hubungan internasional. Karena tiadanya otoritas sentral itu maka kelangsungan hidup sesuatu negara pada akhirnya akan ditentukan oleh upaya-upayanya sendiri. Salah satu upaya penting yang banyak ditempuh oleh berbagai negara di dunia adalah dengan memperkuat keamanan nasionalnya, yang di dalamnya kekuatan militer merupakan salah satu komponen yang paling menonjol. Akan tetapi soalnya adalah usaha-usaha untuk memperkuat keamanan nasional melalui pembangunan militer tidak jarang dipandang secara berbeda oleh negara lain, terutama kalau di antara mereka telah terdapat benih-benih perselisihan atau saling curiga, sehingga itu diartikan sebagai memperlemah keamanannya. Lagi pula fungsi persenjataan pada dasarnya ada dua macam, yaitu untuk tujuan ofensif dan maksud-maksud defensif. Dari sebab itu keputusan suatu negara untuk memiliki persenjataan nuklir tidak dapat dilepaskan juga dari konteks yang demikian itu, yang pada dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi dan strategis.

Karena itu alasan-alasan yang merangsang suatu negara untuk memiliki senjata nuklir juga dapat berbeda-beda antara negara satu dengan lainnya. Satu atau perpaduan dari beberapa alasan berikut ini barangkali merupakan pendorong bagi sesuatu negara untuk memiliki persenjataan nuklir. Dari segi militer, terdapat sejumlah perangsang untuk memilih persenjataan nuklir sebagai salah satu komponen kekuatannya.

Pertama, keinginan untuk mencapai keunggulan militer terhadap musuh atau negara yang mungkin secara potensial akan menjadi musuhnya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II dalam menghadapi Jerman dan Jepang. *Kedua*, untuk membangun suatu kekuatan penangkal, baik terhadap kekuatan nuklir lawan yang telah memiliki persenjataan nuklir terlebih dahulu, seperti Uni Soviet terhadap Amerika Serikat, serta Inggris dan Perancis terhadap Uni Soviet, maupun untuk menghadapi kekuatan konvensional yang lebih besar, seperti nuklir negara-negara Barat terhadap kekuatan konvensional Soviet atau kecurigaan terhadap Israel yang telah mempunyai persenjataan nuklir untuk menghadapi ancaman konvensional dari negara-negara tetangganya. *Ketiga*, keinginan untuk lebih mandiri sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada perlindungan nuklir dari negara sekutunya atau sahabatnya, seperti yang dilakukan Inggris, Prancis, dan RRC, atau karena kekhawatiran mengenai kredibilitas perlindungan nuklir sekutunya, misalnya Korea Selatan, Jepang, Israel, dan Taiwan terhadap Amerika Serikat, dalam menghadapi ancaman militer lawan yang lebih kuat. Dan *keempat*, keinginan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi militer sehingga tidak terlalu tergantung pada negara-negara besar dan tetap

membuka kemungkinan untuk memiliki persenjataan nuklir sendiri, seperti India, Brasil, Argentina, dan Pakistan.

Dari segi politik-diplomatik, terdapat sejumlah pertimbangan yang dapat dikaitkan dengan usaha-usaha sesuatu negara untuk memiliki persenjataan nuklir. *Pertama*, keinginan itu mungkin dilandasi oleh pertimbangan untuk mendapatkan pengakuan dan prestise dari dunia internasional, dalam tatanan regional, maupun dari lingkungan di dalam negeri sendiri. Kemampuan membuat sendiri senjata nuklir merupakan suatu prestasi tersendiri, sekurang-kurangnya dari segi kemampuan teknologi negara bersangkutan, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara nuklir yang ada dan India. *Kedua*, keinginan untuk ikut serta berperanan lebih nyata dalam usaha-usaha kebijaksanaan keamanan internasional maupun regional dengan mempergunakan kemampuannya membuat senjata nuklir sebagai salah satu alat diplomasinya. Dan *ketiga*, bagi negara yang secara teknologis telah menunjukkan kemampuannya, baik karena kemajuan-kemajuan teoretis dan rekayasanya maupun karena bukti nyata melalui percobaan peledakannya, kemampuan itu dapat dipergunakan sebagai isyarat kepada lawan agar yang terakhir ini tidak memaksanya benar-benar melanjutkan pada pilihan untuk memiliki persenjataan nuklir. India, Israel, Korea Selatan dan Afrika Selatan, misalnya, bisa jadi menempuh politik demikian dalam berhubungan dengan negara-negara tetangganya.

Dari segi ekonomi, pilihan penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan-tujuan damai, khususnya sebagai sumber tenaga listrik, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih mantap di masa depan. Termasuk dalam penggunaan nuklir untuk tujuan damai ini adalah melakukan percobaan-percobaan ledakan nuklir yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk membangun jalan-jalan dan bangunan-bangunan irigasi. Kalau ini yang terjadi, penguasaan senjata nuklir bisa benar-benar merupakan hasil sampingan dari pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai itu. Tetapi mungkin juga terjadi bahwa suatu negara memang menghendaki adanya persenjataan nuklir dalam perangkat militernya karena semata-mata adanya pertimbangan ekonomis. Suatu negara barangkali menyadari bahwa biaya dan kendala ekonomi yang harus dipikulnya terlalu berat dan kehancuran yang akan ditimbulkan oleh penguasaan kekuatan konvensional modern juga sangat besar. Dengan anggapan bahwa persenjataan nuklir akan lebih mampu memberikan bobot penangkal dan strategis yang lebih besar, pemilikan persenjataan nuklir menjadi alternatif yang lebih menarik daripada kekuatan konvensional modern yang sangat besar dan mahal biayanya. Jika program ini dikaitkan dengan adanya reaktor-reaktor nuklir untuk tujuan-tujuan damai, biaya untuk membuat persenjataan nuklir akan menjadi lebih murah lagi dan keuntungan politik-strategisnya akan menjadi lebih besar.

Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan di atas tidak harus berarti secara otomatis proliferasi nuklir secara horisontal akan segera terjadi, terutama di antara negara-negara yang selama ini dikhawatirkan akan menjadi calon-calon pemilik persenjataan nuklir di masa depan. Terdapat sejumlah negara yang secara teknologis akan cepat dapat memproduksi senjata-senjata nuklir dalam waktu singkat, seperti Jepang, Jerman Barat, Swedia, Kanada, Italia, Afrika Selatan dan Argentina. Dan berbagai negara yang dalam waktu agak lebih panjang dapat membuatnya, seperti Australia, Belgia, Ceko, Slovakia, Spanyol, Jerman Timur dan Swiss. Tetapi tidak satu pun di antara mereka selama satu dasawarsa atau lebih terakhir ini yang terbukti membuat persenjataan nuklir. Dengan perkataan lain, meskipun terdapat sejumlah negara, baik yang telah menjadi pihak dalam "Peretujuan Non-proliferasi" (NPT) maupun yang tidak menjadi pihak, yang secara teknologis mampu membuat persenjataan nuklir, kekhawatiran terjadinya proliferasi horisontal lebih lanjut setelah RRC membuat senjata nuklir tidak menjadi kenyataan. Memang kini terdapat kecurigaan bahwa Israel, India dan Afrika Selatan mungkin telah memiliki persenjataan nuklir, tetapi dugaan demikian tampaknya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Jika demikian halnya, maka terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala atau yang tidak memberikan rangsangan bagi sesuatu negara untuk membuat persenjataan nuklir, dalam arti mengembangkan dan menempatkan persenjataan nuklir dalam sistem pertahanan dan strateginya. Secara singkat, pertimbangan-pertimbangan yang menjadi penghambat itu meliputi: (1) pertimbangan keamanan dan militer sesuatu negara tidak mendesaknya/memojokkannya; keterbatasan sumber-sumber yang dapat dikerahkan bisa jadi mengakibatkan jumlah dan kualitas senjata nuklir yang hendak dibuat tidak terlalu besar artinya secara militer/strategis; dan keputusan untuk memiliki persenjataan nuklir secara tergesa-gesa bisa jadi justru akan meningkatkan ketegangan di tingkat regional atau mengundang kecurigaan negara tetangganya makin besar, dengan akibat terjadinya perlombaan senjata dan kekacauan hubungan dengan berbagai pihak; (2) pertimbangan politik-diplomatik mungkin akan menguntungkan suatu negara jika ia meneruskan saja penelitian-penelitian dan pengembangan nuklir tanpa melanjutkannya pada pembuatan persenjataan nuklir, oleh karena kemampuan yang ditunjukkannya dalam bidang nuklir hingga batas-batas tertentu telah memberikannya keuntungan diplomatik-politik di arena internasional dan regional; (3) pertimbangan ekonomi, menyangkut antara lain kelangsungan pengadaan bahan-bahan baku nuklirnya yang dibutuhkan dari negara pemasok agar tidak terhenti karena begitu pentingnya peranan nuklir dalam kehidupan ekonominya; dan kemungkinan menghadapi kesulitan hebat untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan luar negeri bagi kepentingan ekonominya kalau negara bersangkutan mengupayakan pengembangan persenjataan nuklir.

Ini semua menunjukkan bahwa dalam kondisi internasional dewasa ini terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi perangsang ataupun penghambat bagi terjadinya proliferasi horisontal. Sulit untuk mengatakan faktor mana yang lebih dominan dalam situasi internasional seperti sekarang ini oleh karena suatu kajian secara mendalam mengenai kondisi-kondisi internasional, baik dalam skala global maupun regional, diperlukan agar gambaran yang lebih jelas dapat dicapai. Dan bidang ini bukan menjadi jangkauan dari telaah ini. Kiranya cukup dinyatakan di sini bahwa persepsi dan penilaian masing-masing negara yang kini memiliki potensi nuklir, apakah dengan selubung untuk maksud-maksud damai dan menjadi pihak dalam NPT atau tidak, akan banyak menentukan terjadi atau tidaknya proliferasi horisontal.

IMPLIKASI GLOBAL DAN REGIONAL

Dalam membicarakan masalah proliferasi nuklir secara horisontal, perlu diingat bahwa proliferasi itu telah terjadi sejak dahulu, yaitu ketika Uni Soviet menyusul Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh beberapa negara berikutnya dalam penguasaan persenjataan nuklir. Dari sejarah pengembangan dan proliferasi persenjataan nuklir yang dialami hingga saat ini, belum pernah terjadi dalam perang modern persenjataan nuklir secara langsung dipergunakan. Atau dengan perkataan lain, sejak pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan adanya satu pemilik persenjataan nuklir pun yang pernah mempergunakan persenjataan nuklirnya. Berdasarkan pengalaman demikian ini mungkin orang akan berkesimpulan bahwa apa yang tidak terjadi di masa lalu dalam bidang nuklir tampaknya juga tidak akan terjadi di masa depan; dan dunia nuklir di masa depan tidak akan bertabat menyimpang dari apa yang telah terjadi selama ini.

Lalu bagaimana keadaan dunia ini jika pada masa-masa yang akan datang terjadi penambahan jumlah negara yang melengkapi kekuatan pertahanan dan militernya dengan persenjataan nuklir? Dari satu segi, ada satu hal yang dapat diperhitungkan hingga kurun waktu yang agak panjang di masa depan yaitu sedikit sekali, kalau ada, negara di dunia ini yang secara potensial dan teknologis mampu mengejar tingkat perkembangan persenjataan yang telah dicapai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dewasa ini. Ini berarti bahwa jika terjadi penambahan jumlah negara bersenjata nuklir, motivasi utamanya bukan untuk menyamai atau menyaingi negara-negara adikuasa atau negara besar dalam bidang persenjataan nuklir ini. Terlebih lagi, persoalannya akan jauh dari itu jika yang masuk menjadi anggota baru dalam klub itu adalah negara (negara) Dunia Ketiga. Dalam perspektif demikian ini, negara nuklir baru itu bukanlah lawan bagi negara-negara pemegang nuklir yang ada de-

wasa ini, terutama mengingat jurang teknologi yang begitu besar dan potensi nuklir yang terbatas dari negara-negara Dunia Ketiga.

Di satu pihak, proliferasi nuklir horisontal mungkin akan menempatkan dunia dalam situasi yang berbahaya oleh karena makin banyak negara yang menguasai persenjataan nuklir, maka akan makin besar pula risiko terjadinya perang nuklir. Tetapi di lain pihak, sampai batas-batas tertentu proliferasi justru dianggap akan memperkuat stabilitas keamanan oleh karena pada dasarnya persenjataan nuklir terutama berfungsi sebagai alat untuk menangkal lawan. Dengan perkataan lain, terdapat keragu-raguan mengenai efek-efek positif maupun negatif dari proliferasi horisontal ini oleh karena adanya perbedaan persepsi dalam melihat masalah ini dalam konteks stabilitas keamanan internasional, khususnya dalam lingkup regional, seperti akan dibahas di bawah ini.

Pertama, terdapat anggapan bahwa suatu negara nuklir (baru) akan cenderung terdorong memulai suatu perang, konvensional maupun lainnya, terhadap lawan potensialnya dengan harapan akan memperoleh keuntungan-keuntungan politik dan strategis. Selain itu, semakin banyaknya negara yang memiliki persenjataan nuklir bisa mengakibatkan semakin besarnya bahaya terjadinya perang nuklir yang tidak sengaja (by accident) oleh karena berbagai alasan. Kecenderungan-kecenderungan ini semua terutama kuat di antara negara-negara yang telah mempunyai benih-benih perselisihan baik karena alasan historis, politik, maupun geostrategis.

Tetapi anggapan itu tidak mesti betul seluruhnya sebab keputusan sesuatu negara untuk berperang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Negara pada umumnya tidak cenderung untuk berspekulasi dengan risiko dahsyat hanya sekedar untuk mencapai keuntungan marginal atau yang lebih kecil. Pertimbangan ini akan semakin kuat jika menyangkut negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir, karena perang di antara mereka akan cenderung ke arah eskalasi ke penggunaan persenjataan yang lebih besar dari pihak yang terpojok guna menghindari kerugian-kerugian lebih lanjut. Tingkat pengorbanan dan harga yang harus dibayar mempengaruhi tindakan sesuatu negara: kalau korban dan harga yang harus dibayarnya rendah, mereka mungkin akan bertindak dengan kurang hati-hati. Sebaliknya kalau korban dan harga itu sangat tinggi, mereka akan bertindak dengan sangat berhati-hati sekalipun dalam keadaan krisis. Krisis Kuba tahun 1962 menunjukkan kehati-hatian kedua negara adikuasa dalam masalah ini; demikian pula dalam krisis Suez tahun 1956.

Selain itu, dalam perang konvensional mungkin pendudukan wilayah dapat berarti jaminan keamanan lebih besar bagi sesuatu negara. Tetapi pemi-

liken senjata nuklir akan lebih dapat memberikan kekuatan penangkal yang mendorong sesuatu negara untuk tidak perlu melakukan perang dalam mencapai tingkat keamanannya. Lagi pula dalam perang pada umumnya pihak yang diserang mempunyai kemauan yang lebih besar untuk mempertahankan wilayahnya terhadap agresi dan pendudukan. Hal ini tentunya disadari oleh sesuatu pihak yang melakukan "agresi" sehingga ia telah mempunyai gambaran yang jelas mengenai akhir peperangan jika ia memulainya. Dalam konflik konvensional orang mungkin tidak tahu pasti apakah dia akan menang atau kalah, akan tetapi dalam konflik yang bisa melibatkan persenjataan nuklir orang lebih dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kelangsungan hidupnya sendiri. Pertimbangan demikian akan membuat tingkah laku militernya jauh lebih hati-hati.

Kedua, khususnya terhadap negara-negara Dunia Ketiga, terdapat kekhawatiran mengenai stabilitas regional akibat proliferasi nuklir itu. Kekhawatiran ini bersumber pada beberapa faktor yang terdapat di tingkat regional, yang menyangkut hubungan-hubungan politik dan strategis negara-negara dalam kawasan bersangkutan dan masalah-masalah stabilitas domestik dari masing-masing negara. Di berbagai bagian dunia tidak jarang terdapat pemimpin-pemimpin politik dan militer yang ambisius, revolusioner, otoriter, radikal, "gegabah," dan tidak populer baik di tingkat regional maupun di dalam negeri sendiri, yang dapat memperuncing konflik-konflik regional. Para pemimpin yang demikian ini jika terlibat dalam konflik regional yang tajam dikhawatirkan tidak dapat mengendalikan diri untuk tidak mempergunakan persenjataan nuklirnya terhadap negara lain, terutama karena jenis pemimpin dengan karakter yang demikian itu dipandang "tidak rasional" dan tidak bertanggung jawab. Dari sebab itu mereka ini lebih dicurigai sebagai pembawa bencana daripada sebagai pemimpin yang secara saksama memperhitungkan keselamatan negara dan rakyatnya sendiri.

Akan tetapi kecemasan semacam itu, yang umumnya terdapat di kalangan negara-negara "maju," oleh sementara pihak, khususnya mereka yang datang dari Dunia Ketiga, dipandang sebagai cerminan dari sikap kesombongan dan rasa superioritas rasial terhadap negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Padahal dalam kenyataannya, meskipun pemimpin-pemimpin tersebut mungkin revolusioner, ambisius, otoriter, radikal, dan tidak populer, dalam hal-hal yang fundamental mereka juga bisa bersikap rasional dan bertanggung jawab. Ketika RRC masih dianggap sebagai negara yang revolusioner dan tidak rasional, khususnya pada masa Revolusi Kebudayaan dan pada waktu terlibat konflik terbuka dengan Uni Soviet menjelang akhir dasawarsa 1960-an, ia tidak mempergunakan persenjataan nuklirnya terhadap Uni Soviet. Dalam hal ini RRC "rasional" mungkin karena belum mampu, atau takut akan balasan yang lebih dahsyat.

Yang lebih menonjol lagi adalah tindakan Khadafi dari Libia dalam konflik di Timur Tengah yang hingga kini dianggap sebagai pemimpin yang paling "gila" di dunia. Pada waktu Libanon diduduki Israel dan PLO diporakporandakan Israel, ia tidak memerintahkan tentara Libia dan pesawat-pesawat tempurnya menyerang Israel. Jika Libia dan Israel sama-sama memiliki persenjataan nuklir, apakah Khadafi akan bertindak lain menghadapi keadaan serupa demi "kegilaannya" belaka? Kalau pada tingkat konvensional saja ia ternyata tidak gegabah untuk menggunakan kekerasan ia mungkin sekali akan lebih berhati-hati dan rasional dalam persenjataan nuklir, antara lain karena bencana yang dahsyat dalam kaitan ini. Jadi alasan kekhawatiran di atas dipandang kurang mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa proliferasi nuklir di antara negara-negara Dunia Ketiga akan jauh berbahaya bagi stabilitas dan keamanan internasional.

Selain itu, terdapat suatu anggapan bahwa adanya masalah-masalah dan konflik-konflik domestik akan menimbulkan komplikasi-komplikasi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap persenjataan nuklir yang mungkin berakibat terjadinya pengelolaan secara tidak bertanggung jawab atas persenjataan tersebut. Persoalan ini terutama dihubungkan dengan pudarnya supremasi kekuasaan sipil atas militer, sehingga makin menonjolnya peran politik kelompok militer akan cenderung lebih merangsang terjadinya konflik antarnegara sehingga persenjataan nuklir akan lebih cepat dipergunakan oleh penguasa militer dalam upayanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Atau bisa juga terjadi karena perbedaan-perbedaan pendapat di antara golongan sipil dan golongan militer pada suatu negara, persenjataan nuklir yang dimilikinya akan lebih mudah jatuh ke tangan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, seperti gerakan-gerakan politik sub-nasional atau bahkan kaum teroris, sehingga bencana nuklir akan lebih mudah terjadi. Ini merupakan bahaya lain yang bisa muncul sebagai akibat proliferasi yang ditakutkan terutama oleh berbagai kalangan di negara-negara maju.

Pengalaman sejarah ternyata tidak selalu membenarkan anggapan demikian itu, bahkan dalam tingkat persenjataan konvensional. Ketika Indonesia menghadapi masalah-masalah yang besar di dalam negeri, pemerintahannya didominasi oleh orang-orang sipil; dan di bawah pemerintahan demikian inilah konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara lain terjadi. Sebaliknya Marsekal Tito membawa Yugoslavia bekerjasama dengan berbagai negara baik dalam kelompok negara-negara Barat maupun negara-negara sosialis. Jenderal Ne Win yang memimpin Birma tidak membawa negaranya berselisih secara tajam dengan para tetangganya tetapi justru membawa negeri itu ke dalam politik isolasionis.

Karena itu, persoalan memulai konflik atau perang bukanlah semata-mata urusan dari suatu pemerintah apakah itu yang didominasi oleh kelompok sipil

atau militer. Demikian pula usaha-usaha untuk menghindari dan menghentikan konflik antarnegara, seperti peristiwa-peristiwa di berbagai bagian dunia membuktikannya. Intinya adalah bahwa baik sipil maupun militer, mereka pasti menyadari kedahsyatan suatu konflik nuklir tetapi tidak dapat memastikan apakah mereka dapat mengendalikan konflik dan perang jika ia memulainya sehingga kelangsungan rezimnya sendiri dapat terancam. Karena itu justru ada keyakinan jika mereka memiliki persenjataan nuklir mereka akan harus belajar hidup dalam "dunia nuklir" di mana mereka merupakan bagian. Pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih saksama dalam kebijaksanaan mereka akan membuatnya semakin terbiasa dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem-sistem pengawasan, komando, dan komunikasi dalam bidang ini, dan karena itu berusaha untuk selalu meningkatkan cara-cara dan prosedur-prosedur pengamanannya, dan sebagainya. Menurut pertimbangan-pertimbangan ini, proliferasi mungkin justru lebih mendorong terselenggaranya suatu kawasan yang lebih aman dan stabil.

Ketiga, di satu pihak terdapat anggapan bahwa persenjataan nuklir mempunyai kegunaan untuk menghadapi konflik-konflik regional, jika hanya satu negara saja memiliki persenjataan nuklir di kawasan bersangkutan, guna menggantikan peran persenjataan konvensional yang dianggap tidak efektif. Negara yang terlibat dalam konflik regional yang mendalam itu, dan kemudian memiliki persenjataan nuklir, akan tergoda untuk mempergunakan persenjataannya guna mengakhiri konfliknya untuk selamanya. Jika Israel memiliki persenjataan nuklir, maka ia akan mempergunakannya terhadap musuh-musuh di sekelilingnya untuk mengakhiri ancaman yang dihadapinya. Tetapi karena bencana nuklir akan terjadi terhadap lawan, mungkin sekutu lawan yang bersenjata nuklir akan membelanya, sehingga kemungkinan untuk eskalasi tidak tertutup.

Di lain pihak, terdapat anggapan bahwa ancaman penggunaan persenjataan nuklir dalam situasi demikian itu justru untuk menangkal lawan yang memiliki persenjataan konvensional cukup besar dan selalu menjadi sumber ancaman keamanannya. Pertimbangan-pertimbangan dalam strategi militer pada dasarnya adalah rumit, dan hal itu akan lebih rumit lagi kalau faktor nuklir terlibat di dalamnya. Menyadari bahwa lawan mempunyai persenjataan nuklir sedangkan dirinya sendiri tidak, sesuatu pihak akan tidak secara sembarangan menyudutkan lawan melalui suatu invasi konvensional mengingat pilihan yang dapat diambil oleh lawan itu pada akhirnya adalah mempergunakan persenjataan nuklirnya. Kalau ini terjadi, kehancuranlah yang diterimanya sebagai akibat dari inisiatifnya untuk memojokkan lawan melalui konflik konvensional, suatu keadaan yang tidak terlalu mudah untuk diabaikan oleh setiap pemimpin. Dalam situasi seperti itu pada akhirnya yang terjadi adalah mekanisme deterrence/penangkalan berjalan, dan negara yang memiliki

persenjataan nuklir itu merasa lebih aman tanpa mempergunakan senjatanya dalam suatu peperangan, walaupun terdapat risiko negara lainnya akan mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri atau beraliansi dengan kekuatan nuklir.

Uraian di atas hanya menunjukkan bahwa dalam masalah proliferasi horisontal dan akibat-akibatnya terhadap stabilitas dan keamanan global dan regional tidak dapat dinyatakan dalam pernyataan hitam-putih. Oleh karena persoalannya tidak dapat dilihat secara hitam-putih, maka pemilikan persenjataan nuklir oleh sebanyak mungkin negara di dunia barangkali bukan merupakan alternatif terbaik untuk menjamin stabilitas dan keamanan internasional.

Tetapi jika di masa depan terjadi pertambahan jumlah negara, mungkin hanya beberapa saja, yang memiliki persenjataan nuklir, situasi internasional barangkali justru dapat lebih stabil. Namun ini juga berarti bahwa kemungkinan pecahnya perang nuklir, bagaimanapun jauhnya hal itu, secara absolut tidak dapat diabaikan, sebab secara sebagian hal ini banyak ditentukan oleh tingkah laku negara dan para pemimpinnya yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

PENUTUP

Dalam sejarah perkembangan persenjataan nuklir selama empat dasawarsa ini, secara jelas lima negara besar melengkapi sistem pertahanan dan militernya dengan persenjataan nuklir, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis dan RRC. Di samping itu, India telah menunjukkan kemampuannya untuk membuat persenjataan nuklir, dan jika ia menghendaki dalam waktu yang relatif agak singkat dapat memiliki sejumlah persenjataan nuklir.

Akan tetapi hingga sekarang India masih tetap bersikap tidak mengembangkan persenjataan kendati teknologinya telah mencapai tingkat itu; namun India juga tidak mau terikat pada Persetujuan Non-Proliferasi. Selain India, Israel dan Afrika Selatan hingga batas-batas tertentu dicurigai telah memiliki atau secara teknologis telah dapat membuat persenjataan nuklir dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Negara-negara maju juga sudah banyak yang secara teknologis mampu dalam waktu cepat membuat persenjataan nuklir dan sistem-sistem pendukungnya baik di darat, udara maupun laut. Sedangkan sejumlah negara lainnya terutama di kalangan negara-negara Dunia Ketiga juga telah sampai atau telah mendekati pada kemampuan teknologis untuk membuat persenjataan nuklir.

Akan tetapi jika perkembangan proliferasi horisontal ini diamati secara saksama, proliferasi yang "cepat" terjadi selama dua dasawarsa pertama sejak Perang Dunia II. Dalam kurun waktu itu lima negara secara resmi menjadi anggota kelompok negara-negara nuklir. Sedangkan dalam kurun waktu dua dasawarsa berikutnya, tidak satu pun negara, kendati teknologi untuk membuatnya telah dimiliki, yang secara resmi menjadi anggota baru dalam kelompok nuklir tersebut. Keadaan dua dasawarsa terakhir ini menunjukkan bahwa dalam urusan memiliki persenjataan nuklir terdapat pertimbangan-pertimbangan kompleks yang tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat teknologi dan pembiayaan, tetapi juga oleh pertimbangan-pertimbangan militer, politik-diplomatik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara pada umumnya. Keadaan dua dasawarsa terakhir ini perlu dikemukakan oleh karena kekhawatiran yang "berlebihan" mengenai cepatnya proliferasi pada akhir dasawarsa 1960-an dan 1970-an tidak terbukti.

Dari sebab itu hikmah yang dapat ditarik sebagai pelajaran dalam bidang proliferasi horisontal ini ialah, keputusan suatu negara untuk memiliki persenjataan nuklir terutama didasari oleh kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak baik dari segi militer, politik-diplomatik, maupun menurut pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Jika di masa depan jumlah negara pemilik persenjataan nuklir terbukti bertambah, keadaan seperti ini seharusnya dilihat sebagai suatu akibat dari proses yang terjadi dalam hubungan internasional sendiri. Mungkin dunia akan menghadapi kompleksitas permasalahan yang lebih rumit lagi bila keadaan itu tiba, akan tetapi ia tidak akan dapat melarikan diri dari kenyataan seperti itu. Konsekuensinya adalah dunia umat manusia harus belajar untuk hidup di dalam situasi di mana kemungkinan beberapa negara akan melengkapi diri dengan persenjataan nuklir. Untuk keadaan seperti itu barangkali yang paling dibutuhkan adalah mencari cara dan jalan atau pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi di luar penggunaan persenjataan nuklir.

Sudah barang tentu proliferasi secara cepat dan "liar," akan berbahaya bagi stabilitas dan keamanan internasional, sebab kemungkinan tidak lagi dapat dilihat apa yang menjadi alasan kejadian semacam itu, sehingga salah pengertian dan insiden mudah terjadi. Tetapi pengalaman dua dasawarsa terakhir ini memberi pertanda bahwa situasi seperti itu tidak mudah terjadi. Ketakutan yang berlebihan mengenai kemungkinan "kecelakaan" nuklir bila terjadi proliferasi harus dilihat dengan penuh kehati-hatian. Tingkah laku negara, apakah itu negara maju ataupun negara-negara sedang berkembang pada umumnya akan menjadi jauh berhati-hati apabila ia berurusan dengan sesuatu yang dianggapnya dahsyat. Masalah keamanan nasional yang melibatkan persenjataan nuklir dapat dipastikan berada dalam kategori ini, dan setiap negara yang berusaha untuk menjamin keamanan maksimumnya,

termasuk kalau ia memilih persenjataan nuklir untuk itu, akan memahami keadaan dan kompleksitasnya. Walaupun demikian harus diakui bahwa hingga kini tidak ada suatu mekanisme yang secara absolut telah mampu meniadakan kemungkinan pecahnya perang nuklir.

Dalam kaitan ini semua, tentu harus diperhatikan pula bahwa tidak semua negara di dunia mempunyai cadangan uranium maupun plutonium di dalam negeri sendiri yang mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan pengembangan persenjataan nuklir. Padahal uranium dan plutonium dewasa ini dianggap sebagai bahan utama bagi pengembangan persenjataan nuklir, meskipun penelitian-penelitian di negara-negara yang telah sangat maju dalam bidang ini menyimpulkan juga bahwa sejumlah bahan-bahan lain dapat dikembangkan untuk membuat persenjataan nuklir.

Tetapi kemajuan teknologi negara-negara di dunia, dan negara-negara Dunia Ketiga khususnya, masih akan tetap jauh tertinggal dalam bidang ini jika tidak terjadi loncatan-loncatan teknologis. Tiadanya cadangan uranium yang memadai dan sulitnya teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir serta adanya sejumlah mekanisme untuk mengamankan pengadaan dan pengalihan bahan-bahan nuklir dari satu negara ke negara lain, merupakan perintang lainnya bagi terjadinya proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Suatu negara yang tergantung pengadaan uranium dan plutoniumnya dari luar akan bertindak hati-hati supaya kebutuhannya akan bahan-bahan itu tidak terhenti dan justru merugikan kepentingannya yang lebih besar, misalnya dalam hal kelangsungan pengadaan sumber energinya.

REFERENSI

- Barnaby, Frank C., "How States Can 'Go Nuclear'," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (March 1977), pp. 29-43. Untuk selanjutnya, jurnal ini disebut sebagai *The Annals*.
- Epstein, William, *The Last Chance: Nuclear Proliferation and Arms Control* (New York: Free Press, 1976).
- Idem, "Why States Go -- and Don't Go -- Nuclear," *The Annals* (March 1977), pp. 16-28.
- Gompert, David C., Michael Mandelbaum, Richard Garwin, and John H. Burton, *Nuclear Weapons and World Politics: Alternatives for the Future* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1977).

- Greenwood, Ted, Harold A. Feiveson, Theodore B. Taylor, *Nuclear Proliferation: Motivations, Capabilities, and Strategies for Control* (New York: McGraw-Hill Book Company untuk Council on Foreign Relations, 1980).
- Imai, Ryukichi, and Henry S. Rowen, *Nuclear Energy and Nuclear Proliferation: Japanese and American Views* (Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1980).
- Kapur, Ashok, "Nth Powers of the Future," *The Annals* (March 1977), pp. 84-95.
- Idem, "The Nuclear Spread: A Third World View," *The Third World Quarterly* (January 1980), pp. 59-75.
- Kreiger, David, "What Happens If ...? Terrorists, Revolutionaries, and Nuclear Weapons," *The Annals* (March 1977), pp. 44-57.
- Lefever, Ernest W., *Nuclear Arms in the Third World: U.S. Policy Dilemma* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1979).
- Maddox, John, "Prospects for Nuclear Proliferation," *Adelphi Papers No. 113* (Spring 1975).
- Spector, Leonard S., *Nuclear Proliferation Today* (New York: The Carnegie Endowment for International Peace, 1984).
- Stockholm International Peace Research Institute, *Nuclear Proliferation Problems* (Stockholm: SIPRI, 1974).
- Subrahmanyam, K., (Ed.), *Nuclear Proliferation and International Security* (New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 1985).
- Waltz, Kenneth N., "The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better," *Adelphi Papers No. 171* (Autumn 1981).
- Weltman, John J., "Nuclear Devolution and World Order," *World Politics* (January 1980), pp. 169-193.

ANALISA

1978 — 1985

Nomor-nomor tahun 1978 s/d 1983 @ Rp 500,00

- 1/1978: PERSPEKTIF 1978*
- 2/1978: VIETNAM-KAMBOJA, SELAT MALAKA DAN MASALAH RASIAL*
- 3/1978: PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA*
- 4/1978: DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL*
- 5/1978: KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
- 6/1978: STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA
- 7/1978: BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
- 8/1978: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 9/1978: NEGARA-NEGARA ASEAN
- 10/1978: SUMPAH PEMUDA DAN PERSATUAN INDONESIA
- 11/1978: PERSAINGAN TIMUR-BARAT
- 12/1978: PEMBINAAN GENERASI MUDA*

- 1/1979: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 2/1979: BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN*
- 3/1979: TIMUR TENGAH DALAM SOROTAN
- 4/1979: PERATAAN PENDAPATAN
- 5/1979: FOKUS ATAS AFRIKA
- 6/1979: PERJUANGAN DUNIA BARU
- 7/1979: PERANG MELAWAN KEMISKINAN*
- 8/1979: ASIA TENGGARA BERGOLAK
- 9/1979: STRATEGI PEMBANGUNAN DINJAU KEMBALI
- 10/1979: MENANJAKNYA DAN PROSPEK KAWASAN PASIFIK
- 11/1979: MENUJU PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL
- 12/1979: AKTUALITAS INTERNASIONAL

- 1/1980: BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL
- 2/1980: PEDESAAAN FOKUS PEMBANGUNAN*
- 3/1980: KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN
- 4/1980: MENGAMANKAN SUPLAI ENERGI
- 5/1980: KAWASAN SAMUDRA HINDIA FOKUS KETEGANGAN
- 6/1980: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 7/1980: JEPANG DALAM DUNIA YANG BERUBAH
- 8/1980: PERJUANGAN Keadilan Sosial
- 9/1980: ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN
- 10/1980: PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT
- 11/1980: PERKEMBANGAN DI AFRIKA
- 12/1980: WANITA, HAKIKAT DAN PANGGILANNYA

- 1/1981: BERBAGAI MASALAH NASIONAL*
- 2/1981: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1981: PEMBANGUNAN PEDESAAAN*
- 4/1981: RRC, CALON RAKSASA DUNIA*
- 5/1981: ORIENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL*
- 6/1981: TIMUR TENGAH PUSARAN STRATEGIS
- 7/1981: SEGI-SEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- 8/1981: PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA
- 9/1981: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
- 10/1981: ASIA-PASIFIK DASAWARSA 1980-AN
- 11/1981: PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI
- 12/1981: PERTARUNGAN TIMUR-BARAT*

- 1/1982: PERSPEKTIF EKONOMI*
- 2/1982: FOKUS ASIA TENGGARA
- 3/1982: DEMOKRASI SOSIAL
- 4/1982: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 5/1982: INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
- 6/1982: HUBUNGAN UTARA SELATAN*

- 7/1982: PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
- 8/1982: PERSPEKTIF ASIA-PASIFIK
- 9/1982: MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN*
- 10/1982: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 11/1982: GARIS-GARIS BESAR PEMBANGUNAN PEDESAAAN
- 12/1982: FOKUS KAWASAN SAMUDRA HINDIA
- 1/1983: SOSIALISASI
- 2/1983: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1983: PEMBANGUNAN POLITIK
- 4/1983: DINAMIKA ASIA-PASIFIK
- 5/1983: BUNGA RAMPAI PEMBANGUNAN
- 6/1983: PERKEMBANGAN DI ASIA SELATAN DAN BARAT
- 7/1983: MENGGALAKKAN PARTISIPASI EKONOMI
- 8/1983: ASIA TENGGARA DAN DUNIA*
- 9/1983: DINAMIKA INTERNASIONAL
- 10/1983: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP
- 11/1983: MENUJU STRATEGI ENERGI
- 12/1983: UNI SOVIET DAN RRC

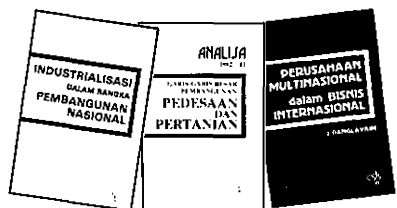
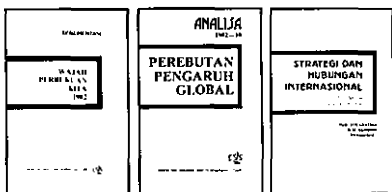
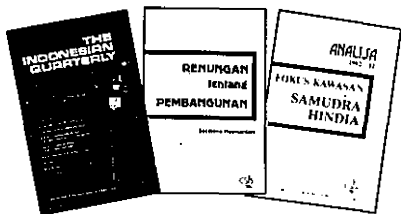
Nomor-nomor Tahun 1984 dan seterusnya @ Rp 750,00

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN INDONESIA-VIETNAM
- 5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- 6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI
- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAAN
- 11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

- 1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT & PEMECAHANNYA
- 2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI & POLITIK INDONESIA
- 3/1985: MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI
- 4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN
- 5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
- 6/1985: PENGGALAKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH
- 7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN
- 8/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK LUAR NEGERI
- 9/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI
- 10/1985: KELUAR DARI KEMELUT EKONOMI
- 11/1985: MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN
- 12/1985: MEMAHAMI PERMASALAHAN ENERGI

ANALISA 1979 Rp 9.000,00 ANALISA 1982 Rp 9.000,00
 ANALISA 1980 Rp 9.000,00 ANALISA 1983 Rp 9.000,00
 ANALISA 1981 Rp 9.000,00 ANALISA 1984 Rp 11.000,00
 ANALISA 1985 Rp 11.000,00

Pesanan per pos tambah ongkos kirim ± 15% (minimal Rp 200,00) ke Biro Publikasi CSIS.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:
BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35

